

## **TEORISASI DEMOKRASI, NEGARA BANGSA, DAN MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Anugrah Fazarianto**

Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman

[fazar\\_ari@yahoo.com](mailto:fazar_ari@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

*Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dikatakan Kesatuan karena terbentuk dari pelbagai macam suku, etnis, bangsa dan bahasa, sedangkan dikatakan Republik karena merupakan Negara yang bersifat demokratis. Hal ini merupakan amanat dari para pendiri bangsa Indonesia yang sangat luhur tertuang di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Demokrasi menjadi pilihan utama bangsa Indonesia pada saat ini, yang bertujuan membentuk masyarakat madani sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Setelah terjadinya perubahan UUD 1945, maka dengan tegas dinyatakan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dengan adanya tujuan terbentuknya masyarakat madani dimana keadilan dan kesejahteraan rakyat sangat fundamental dalam pelaksanaannya, maka hukum difungsikan sebagai satu-satunya alat yang digunakan sebagai pengendali dan pengawas perilaku masyarakat. Ciri dari Masyarakat madani adalah memiliki ruang publik yang bebas, toleransi, pluralisme, keadilan, partisipasi sosial, dan supremasi hukum. Tetapi dalam kenyataannya pada saat ini kehidupan berbangsa kita sudah semakin luntur dari nilai demokrasi dan masyarakat madani dengan adanya konflik horizontal yang semakin meluas. Parahnya lagi para penyelenggara Negara melupakan kewajiban yang utama yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Paper ini hendak menganalisa kenapa pelaksanaan pemerintahan sudah tidak sesuai dengan teorisasi demokrasi, Negara bangsa, dan masyarakat madani dalam perspektif UUD 1945. Perubahan UUD 1945 ini tidak sama sekali memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal ini dapat terwujud apabila adanya kesadaran dari penguasa pemerintahan untuk kembali kepada nilai demokrasi dan*

*masyarakat madani yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.*

***Kata kunci:*** demokrasi, negara bangsa, masyarakat madani

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dikatakan Kesatuan karena terbentuk dari pelbagai macam suku, etnis, bangsa dan bahasa, sedangkan dikatakan Republik karena merupakan Negara yang bersifat demokratis. Hal ini merupakan amanat dari para pendiri bangsa Indonesia yang sangat luhur tertuang di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. kemudian sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “NKRI”) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebahagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia-II.

Demokrasi menjadi pilihan utama bangsa Indonesia pada saat ini, yang bertujuan membentuk masyarakat madani sesuai dengan

Pancasila dan UUD 1945. Setelah terjadinya perubahan UUD 1945, maka dengan tegas dinyatakan bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Dengan adanya tujuan terbentuknya masyarakat madani dimana keadilan dan kesejahteraan rakyat sangat fundamental dalam pelaksanaannya, maka hukum difungsikan sebagai satu-satunya alat yang digunakan sebagai pengendali dan pengawas perilaku masyarakat.

Gagasan tentang masyarakat madani (*civil society*) tampak semakin mendapat ruang dalam wacana pemikiran di Indonesia. Kendatipun wacana pemikiran ini baru digunakan sejak akhir dekade 1990-an. Hal ini dibuktikan oleh semakin luasnya lingkup mereka yang terlibat dalam perbincangan *Civil society* (masyarakat madani), tidak terbatas lagi pada lingkup kalangan intelektual dan lembaga swadaya masyarakat, melainkan juga melibatkan mereka yang dekat dengan kelompok politisi, birokrat dan militer. Berkembangnya wacana pemikiran tentang masyarakat madani terkait erat dengan ide besar tentang bagaimana mewujudkan masyarakat Indonesia baru. Namun dalam perkembangan pemikiran di Indonesia masih terjadi perbedaan persepsi dalam memadankan istilah *Civil society* dalam istilah Indonesia. Seperti Muhammad A. S. Hikam, menganggap perbedaan persepsi dalam memahami konsep *Civil society* dalam wacana pemikiran di Indonesia, merupakan suatu perkembangan pemikiran dari sebuah konsep yang coba di terapkan dalam konteks, suatu masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Indonesia, dan belum adanya pengalaman masyarakat Indonesia dalam menerapkan konsep pemikiran masyarakat madani (*civil society*) dalam format kemasyarakatannya.

Ciri yang penting dari Masyarakat madani adalah memiliki ruang publik yang bebas, toleransi, pluralisme, keadilan, partisipasi sosial, dan supremasi hukum. hal inilah yang menjadi pokok pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan maksud terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. Tetapi dalam kenyataannya pada saat ini kehidupan berbangsa kita sudah semakin luntur dari nilai demokrasi dan masyarakat madani dengan adanya konflik horizontal yang semakin meluas. Parahnya lagi para penyelenggara negara melupakan kewajiban yang utama yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok permasalahan ini pun hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah dan dapat dijadikan suatu pekerjaan

rumah (PR) bagi pemerintah yang mana dalam hal ini mereka lah yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan semua masalah terkait dengan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya maupun rakyat dengan rakyat.

Paper ini hendak menganalisa kenapa pelaksanaan pemerintahan sudah tidak sesuai dengan teorisasi demokrasi, Negara bangsa, dan masyarakat madani dalam perspektif UUD 1945? Perubahan UUD 1945 ini tidak sama sekali memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Justru perubahan yang paling vital dalam UUD 1945 malah sangat ditekankan ke dalam aspek politiknya bukan yang terkait dengan pelaksanaan atau pemenuhan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat terwujud apabila adanya kesadaran dari penguasa pemerintahan untuk kembali kepada nilai demokrasi dan masyarakat madani yang telah diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Ajaran Demokrasi**

Sebelum paham atau ajaran demokrasi muncul, kehidupan bangsa, masyarakat dan negara di Eropa dilandasi oleh paham agama, atau dinamakan juga dengan “Teokrasi”, yang artinya pemerintahan/negara berdasarkan Hukum/Kedaulatan Tuhan. Penyelewengan paham Teokrasi yang dilakukan oleh pihak Raja dan otoritas Agama, mengakibatkan kehidupan negara-negara di Eropa mengalami kemunduran yang sangat drastis, bahkan hampir-hampir memporak-poranda seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara disana. Ditengah situasi kegelapan yang melanda Eropa inilah JJ.Rousseau berpendapat bahwa landasan kehidupan bangsa/masyarakat tidak dapat lagi disandarkan pada kedaulatan Tuhan yang dijalankan oleh Raja dan Otoritas Agama, karena sesungguhnya kedaulatan tertinggi di dalam suatu negara/masyarakat berada ditangan rakyatnya dan bukan bersumber dari Tuhan. Bahkan negara/masyarakat berdiri karena semata-mata berdasarkan Kontrak yang dibuat oleh rakyatnya (Teori Kontrak Sosial).

Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (nature) yang

mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah ia raja, bangsawan atau rakyat jelata. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak sosial menentukan di satu pihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan ketertiban dan menciptakan suasana dimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (natural rights) dengan aman. Di pihak lain rakyat akan menaati pemerintahan asal hak-hak alam itu terjamin. Pada hakikatnya teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat atau “demokrasi” ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada ditangan rakyat, dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya. Atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan Rakyat.

Ajaran Demokrasi adalah sepenuhnya merupakan hasil olah pikir JJ. Rousseau yang bersifat hipotetis, yang sampai saat itu belum pernah ada pembuktian empiriknya. Bahkan pada “Polis” atau “City State” di Yunani yang digunakan oleh Rousseau sebagai contoh didalam membangun Ajaran Demokrasi yang bersifat mutlak dan langsung, tidak dapat ditemui adanya unsur-unsur demokrasi. Oleh karenanya Logemann mengatakan bahwa Ajaran Demokrasi JJ.Rousseau sebagai “Mitos Abad XIX”, karena tidak memiliki pijakan pada kenyataan kehidupan umat manusia. Hal ini bertentangan dengan kenyataan dimana rakyat secara langsung dan mutlak (keseluruhan) memegang kendali pemerintahan negara. Karena justru kenyataannya menunjukkan bahwa segelintir (sedikit) oranglah yang memegang kendali pemerintahan negara dan memerintah kumpulan orang yang banyak, yaitu rakyat.

Benturan yang tidak terdamaikan antara Ajaran Demokrasi JJ.Rousseau (yang bersifat mutlak dan langsung) dengan kenyataan empirik kehidupan manusia (yang sedikit memerintah yang banyak), ditambah lagi sebagai akibat perkembangan lembaga negara menjadi “National State” yang mencakup wilayah luas serta perkembangan rakyatnya yang menjadi semakin banyak jumlahnya dan tingkat kehidupannya yang kompleks, maka Ajaran Demokrasi

yang awalnya dicetuskan oleh JJ.Rousseau ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan. Langkah penyempurnaan terhadap Ajaran Demokrasi JJ.Rousseau yang terpenting dan merupakan awal menuju kearah demokrasi modern yaitu Demokrasi Perwakilan yang dikenal sampai kini, adalah dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat di Inggris pada pertengahan Abad XIII (1265). Pada Demokrasi Perwakilan, rakyat secara keseluruhan tidak ikut serta menentukan jalannya pemerintahan negara, tetapi rakyat mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan negara. Untuk menentukan siapakah individu-individu rakyat yang akan mewakili keseluruhan jumlah rakyat di Badan Perwakilan Rakyat ini digunakan mekanisme Pemilihan (Umum) yang bercirikan:

- a. Adanya 2 (dua) atau lebih calon yang harus dipilih ;
- b. Siapa yang mendapatkan suara terbanyak dari calon-calon yang ada, maka dialah yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat guna mewakili mayoritas rakyat pemilih.

Kemudian sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan masyarakat di dunia tata-cara dan model Pemilihan wakil-wakil rakyat berkembang menjadi model-model pemilihan yang bervariasi, tetapi tetap berintikan kedua ciri di atas.

Timbulnya variasi model demokrasi perwakilan ini menurut kacamata Ilmu Hukum Tata Negara bersumber dari perbedaan nilai-nilai dasar bersama yang dianut oleh rakyat pada masing-masing negara, dan secara khusus pada gilirannya tercermin melalui perbedaan pada sistem pembagian kekuasaan dan sifat hubungan antar lembaga-lembaga negara (terutama antara Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif), yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang bersangkutan. Namun semua variasi model demokrasi perwakilan harus tetap berpegang pada 4 (empat) prinsip, yaitu :

- 1) Prinsip Kedaulatan Rakyat, dimana Konstitusi negara yang bersangkutan harus menetapkan bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan) berada ditangan rakyat ;
- 2) Prinsip Perwakilan, dimana Konstitusi negara yang bersangkutan harus menetapkan bahwa kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu dilaksanakan oleh sebuah atau beberapa lembaga perwakilan rakyat ;

- 3) Prinsip Pemilihan Umum, dimana untuk menetapkan siapakah diantara warganegara yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat itu, harus diselenggarakan melalui pemilihan umum .
- 4) Prinsip Suara Mayoritas, dimana mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan keberpihakan kepada suara mayoritas.

Tanpa adanya ke-4 ciri pokok diatas secara lengkap, maka suatu tatanan kenegaraan tidak dapat dikatakan sebagai Model Demokrasi.

## **2. Masyarakat Madani**

Ada beberapa definisi masyarakat madani dari berbagai pakar di pelbagai negara yang menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1) Zbigniew Rau**

Latar belakang kajiannya adalah pada kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengendalikan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul diantara hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Oleh karenanya, maka yang dimaksud masyarakat madani adalah sebuah ruang yang bebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara.

### **2) Han Sung-joo**

Dengan latar belakang kasus korea selatan, ia mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbatas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam *Civil society* ini.

### 3) Kim Sunhyuk

Juga dalam konteks korea selatan, ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari (re) produksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam suatu ruang publik, guna menyatakan kepedulian mereka dan kemajuan kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

Pelbagai batasan dalam memahami term masyarakat madani di atas, jelas merupakan suatu analisa dari kajian kontekstual terhadap performa yang diinginkan dalam mewujudkan masyarakat madani. Akan tetapi secara global dari ketiga batasan diatas dapat ditarik benang emas, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik (*public sphere*) dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.

Sebagai sebuah gagasan, masyarakat madani adalah produk pengalaman sejarah, yakni sejarah masyarakat barat. Sepanjang sejarahnya, masyarakat madani mengalami berbagai model pemaknaan. Pertama, masyarakat dipahami sebagai sisitem kenegaraan. Pemahaman dikembangkan oleh Arisoteles (384-322M) Marcus Tullius Cicero (106-43M), Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704). Arisoteles tidak memakai istilah *civil society*, tetapi *koinoniepolitike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pada paruh kedua abad ke 18, Adam Ferguson (1767) memakai masyarakat madani sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara untuk tanggung jawab sosial yang bercirikan solidaritas sosial dan yang terilhami oleh sentimen moral serta sikap saling menyayangi antar warga secara alamiah. Ketiga, Thomas Paine (1792) menilai memakai masyarakat madani dalam diametral dengan negara, bahkan masyarakat madani dinilai sebagai antitesis negara. Keempat, menurut Hegel, struktur sosial terbagi atas tiga entitas, yaitu keluarga, masyarakat madani, dan negara. Keluarga adalah ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan



keharmonisan. Masyarakat madani merupakan tempat berlangsungnya konflik pemenuhan kepentingan pribadi atau kelompok, terutama kepentingan ekonomi. Ia bukanlah wilayah praksis politik. Praksis politik hanya monopoli negara. Sementara negara adalah representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi ke dalam masyarakat madani. Karl Marx (1818-1883) memahami masyarakat madani sebagai “Masyarakat borjuis” dalam hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan, karena itu, ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sedangkan Antonio Gramsci menempatkan masyarakat madani pada superstruktur, berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagai *political society*. Masyarakat madani adalah tempat perebutan posisi hegemoni diluar kekuatan negara. Kelima, Alexis ‘De Tocqueville’ mengembangkan teori masyarakat madani yang dimaknai sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara.

Kemudian, dalam hal penyebutan karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Prasyarat ini merupakan satu kesatuan yang integral menjadi dasar dan nilai bagi ekstensi masyarakat madani, yaitu:

1) *Free public sphere*

Yang dimaksud dengan *Free public sphere* adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bias diartikan sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik.

Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka *free public sphere* menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga

negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

## 2) Demokratis

Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga Negara memiliki kehidupan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh banyak pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penekanan demokrasi (demokratis) disini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosisl, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

## 3) Toleran

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid yaitu merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “mamfaat” dari pelaksanaan ajaran yang benar. Azyumardi Arza pun menyebutkan bahwa masyarakat madani (*civil society*) lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan tamaddun (*civility*). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.

#### 4) Pluralisme

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu dengan bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan Pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*). Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan desigh-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dengan sebangun dalam segala segi.

#### 5) Keadilan Sosial (*Sosial Justice*)

Keadilan yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

#### 6) Pilar Penegak Masyarakat Madani

Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Dalam penegakan masyarakat madani, pilar-pilar tersebut menjadi

prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Pilar-pilar tersebut yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Supremasi Hukum, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.

Lembaga swadaya masyarakat, adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu, LSM dalam konteks masyarakat madani juga bertugas mengadakan empowering (pemberdayaan) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan dan sosialisasi program-program pembangunan masyarakat.

Pers, merupakan institusi yang penting dalam penegakan masyarakat madani, karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Hal tersebut pada akhirnya mengarah pada adanya independensi pers serta mampu menyajikan berita secara objektif dan transparan.

Supremasi Hukum, setiap warga negara baik yang duduk di formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat, harus tunduk kepada (aturan) hukum. Hal tersebut berarti bahwa perjuangan untuk mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antara warga negara dengan pemerintah haruslah dilakukan dengan cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar hak asasi manusia, sehingga terpola bentuk kehidupan yang civilized.

Perguruan Tinggi, yakni dimana tempat civitas akademiknya (dosen dan mahasiswa) merupakan bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak pada bidang jalur modal force untuk menyalirkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada rel dan realitas yang betul-betul objektif, menyuarkan kepentingan masyarakat (publik).

Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat madani, maka Perguruan Tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-

ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapkan oleh masyarakat. Di sisi lain Perguruan Tinggi memiliki “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang harus dapat diimplementasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat (publik). Menurut Riswanda Immawan, Perguruan Tinggi memiliki tiga peran yang strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, yakni pertama, pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang menjadi kehidupan dasar politik yang demokratis. Kedua, membangun *political safety net*, yakni dengan mengembangkan dan mempublikasikan informasi secara objektif dan tidak manipulatif. Political net ini setidaknya dapat mencerahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka terhadap informasi. Ketiga, melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang santun, saling menghormati. Demokrasi serta meninggalkan cara-cara yang agitatif dan anarkis.

Partai Politik, merupakan wahana bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni, tetapi bagaimanapun sebagai sebuah tempat ekspresi warga negara, maka partai politik ini menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.

### **3. Demokrasi dan Masyarakat Madani dalam perspektif UUD 1945**

Dalam masyarakat madani, warga negara berkerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-governmental untuk mencapai kebaikan bersama (public good). Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap negara (*vis a vis the state*). Disinilah kemudian masyarakat madani dipahami sebagai akar dan awal keterkaitannya dengan demokrasi dan demokratisasi. Pemerintah tetap merupakan faktor yang krusial bagi demokratisasi dan pembaruan (reformasi) politik, yang merupakan agenda bagi berbagai gerakan dan kelompok dalam masyarakat. Seperti ditambahkan oleh Norton, reformasi politik itu penting untuk menjamin stabilitas yang statis, tapi stabilitas yang dinamis.

Untuk menciptakan masyarakat madani yang kuat dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan demokrasi diperlukan strategi penguatan *Civil society* lebih ditujukan ke arah pembentukan negara secara gradual dengan suatu masyarakat politik yang demokratis-

partisipatoris, selektif dan dewasa yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol atas kecenderungan eksekutif negara. Dalam masyarakat madani, warga negara disadarkan posisinya sebagai pemilik kedaulatan dan haknya untuk mengontrol pelaksanaan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat.

Jadi membicarakan hubungan demokrasi dengan masyarakat madani merupakan masalah yang memiliki hubungan korelatif dan berkaitan erat. Dalam hal ini Arief Budiman mengatakan bahwa berbicara tentang interaksi antara masyarakat madani. Asumsinya adalah, jika masyarakat madani vis a vis negara relatif kuat maka dan masyarakat madani lemah maka demokrasi tidak berjalan. Dengan demikian, demokrasi, demokratisasi dipahami sebagai proses pemberdayaan masyarakat madani. Lebih lanjut Arief mengatakan bahwa proses pemberdayaan tersebut akan terjadi jika pertama apabila berbagai kelompok masyarakat dalam masyarakat madani mendapat peluang untuk lebih banyak berperan, baik pada tingkat negara maupun masyarakat. kedua, jika posisi kelas tertindas berhadapan dengan kelas yang dominan menjadi menjadi lebih kuat yang berarti juga terjadinya proses pembebasan rakyat dari kemiskinan dan ketidakadilan.

Sesuai dengan UUD 1945, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945, artinya kekuasaan negara dalam menjalankan pemerintahan haruslah sesuai dengan kehendak rakyat dan dalam melaksanakan pemerintahan pun harus sesuai dengan konstitusi negara yang menjadikan Indonesia sebagai negara hukum. pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan hukum yang berlaku ini merupakan pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan terciptanya masyarakat madani yang telah menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat terwujud di negara ini.

Demokrasi yang sesuai dengan kehendak rakyat haruslah dibatasi oleh hukum, yang mana hal ini akan menimbulkan kesinambungan dalam terwujudnya negara yang berdasarkan hukum atau lebih dikenal dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional di Indonesia merupakan cita-cita dari pelaksanaan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Kesemua nilai tersebut bertujuan membentuknya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, yang merupakan perwujudan dari masyarakat madani. Hal mana tidak terlaksananya demokrasi yang baik dan belum terwujudnya

masyarakat madani tersebut dikarenakan belum terlaksananya supremasi hukum, kesejahteraan masih langka di masyarakat miskin, partai politik masih mementingkan kepentingan golongan dari pada kepentingan masyarakat luas (baca: warga negara), pers pun masih terkesan dengan keberpihakannya kepada mereka yang mempunyai kekuasaan dan uang, masyarakat Indonesia masih belum bisa toleran dan berfikir pluralisme terhadap suatu perbedaan yang terjadi disekitar mereka, dan belum sama sekali terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk dapat terlaksananya perwujudan demokrasi yang baik dan masyarakat madani di Indonesia ini, maka perlulah dilakukan penyadaran terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya untuk selalu menyadari dan melaksanakan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang memiliki nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah. Dalam hal ini, penulis dapat menyarankan penyadaran akan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 harus segera dilakukan agar tidak ada lagi pelaksanaan tugas pemerintahan keluar dari nilai-nilai tersebut, yang pada akhirnya hanya dapat menyengsarakan rakyatnya.

## **SIMPULAN**

Hal mana tidak terlaksananya demokrasi yang baik dan belum terwujudnya masyarakat madani tersebut dikarenakan belum terlaksananya supremasi hukum, kesejahteraan masih langka di masyarakat miskin, partai politik masih mementingkan kepentingan golongan dari pada kepentingan masyarakat luas (baca: warga negara), pers pun masih terkesan dengan keberpihakannya kepada mereka yang mempunyai kekuasaan dan uang, masyarakat Indonesia masih belum bisa toleran dan berfikir pluralisme terhadap suatu perbedaan yang terjadi disekitar mereka, dan belum sama sekali terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- \_\_\_\_\_, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan, sebuah pengantar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet ke-II, 2000 ), hal. V.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Arief, *State and civil society*, Clayton : Monash Paper Southeast Asia No. 22 Tahun 1990.
- Culla, Adi Surya, *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hikam, Muhammad AS., *Demokrasi dan Civil society*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Islam Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil society*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Gelner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1995.
- Madjid, Nurcholish, *Tuntutan Pengembangan Masyarakat Madani*, KOMPAS, edisi Rabu 28 Juni 2000.
- Ruhardjo, M. Dawan, *Masyarakat Madani : Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES 1999.
- Yara, Muchyar, *Mencari Model Demokrasi ala Indonesia*, Makalah pembicara panel pada Simposium “Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi dan Masyarakat Madani”, yang diselenggarakan oleh Komisi Kebudayaan dan Komisi Ilmu-Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Selasa, 8 Agustus 2006.